
**ANALISIS PENDAPATAN KOTA BATAM TAHUN 2018 - 2020
MELALUI APBD DAN PDRB**

Justyanita, Sephia Septiana, Benny Septiawan dan Micel Thai

Universitas Internasional Batam

E-mail: 1941061.justyanita@uib.edu¹, 1941186.Sephia@uib.edu²,
1941189.benny@uib.edut dan 1941288.micel@uib.edu⁴

Diterima:

24 April 2021

Direvisi:

9 Mei 2021

Disetujui:

14 Mei 2021

Abstrak

Kota Batam, salah satu kota di Provinsi Kepulauan Riau, Indonesia terletak di rute Pelayaran Internasional antara Singapura dan Malaysia. Lokasi Kota Batam berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi Kota Batam yang lebih tinggi dari tingkat pertumbuhan ekonomi nasional sehingga Kota Batam dijadikan andalan untuk memicu pertumbuhan ekonomi nasional karena lokasinya yang strategis yang paling dekat antara Singapura dan Malaysia. Tujuan penelitian ini adalah untuk dapat mengidentifikasi dan menganalisis struktur keuangan daerah atau APBD Kota Batam dalam hal data statistik pendapatan, pengeluaran dan pembiayaan daerah. Sebagai salah satu daerah yang memiliki pertumbuhan ekonomi tinggi, Kota Batam tentunya menyediakan infrastruktur dengan cepat sehingga perlu diselenggarakan. Analisis keuangan daerah pengadaan infrastruktur seperti APBD, PAD dan retribusi daerah sehingga sumber dana kelolaan dapat berjalan optimal, efektif dan secara efisien dalam membiayai pembangunan kota. Metode dalam pengumpulan data yang dilakukan, yaitu dengan menganalisis dan menggunakan data sekunder dari 2 tahun terakhir dengan periode tahun 2018-2020 yang bersumber dari situs resmi Badan Pusat Statistik (BPS) Kota Batam yang ditinjau dari batamkota.bps.go.id. Sektor yang menjadi acuan dalam menggerakkan perekonomian antara lain komunikasi, listrik, air dan gas, perbankan, industri, perdagernan, perdagangan dan jasa, serta komoditas ekspor negara lain. Sebagai salah satu daerah yang memiliki pertumbuhan ekonomi tinggi. Tahun 2019 laju pertumbuhan ekonomi yang diukur oleh Produk Domestik Regional Bruto (GRDP) meningkat signifikan dimana kenaikan mencapai 5,92% dari 4,96% yang merupakan pertumbuhan ekonomi Kota Batam pada 2018.

Kata kunci: Pertumbuhan ekonomi; Struktur keuangan daerah; APBD; GRDP

Abstract

Batam City, one of the cities in the Riau Islands Province, Indonesia is located on an international shipping route between Singapore and Malaysia. The location of Batam City has an influence on the economic growth in Batam City which is higher than the national economic growth rate so that Batam city is used as a mainstay to trigger national economic growth because of its strategic location which is closest between Singapore and Malaysia. The intent of this research was to be able to identify and analyze the regional financial structure or APBD of Batam

City in terms of statistical data on income, expenditure and regional financing. As one of the regions that has high economic growth, Batam City certainly provides infrastructure rapidly so it needs to be held. regional financial analysis of infrastructure procurement such as APBD, PAD, and local levies so that the managed fund sources can run optimally, effectively, and efficiently in financing the city's development. Methods in data collection conducted, namely by analyzing and using secondary data from the last 2 years with the period 2018-2020 sourced from the official website of the Central Statistics Agency (BPS) Batam city reviewed from the batamkota.bps.go.id. Sectors that become references in driving the economy include communications, electricity, water and gas, banking, industry, shipping, trade and services, as well as export commodities of other countries. As one of the regions that has high economic growth. In 2019 the rate of economic growth that was measured by the Gross Regional Domestic Product (GRDP) increased significantly where the increase reached 5.92% from 4.96% which is the economic growth of Batam City in 2018.

Keywords: *Economic growth; Regional financial structure; APBD; GRDP*

PENDAHULUAN

Perkembangan ekonomi merupakan perubahan keadaan pada ekonomi negara secara terus – menerus (Hukom, 2014), melalui proses kenaikan kapasitas produksi negara tersebut dalam bentuk kenaikan pendapatan nasional (Alghofari & Pujiyono, 2011). Faktor utama yang memengaruhi pertumbuhan tersebut, yaitu jumlah pengeluaran daerah seperti pembangunan infrastruktur daerah (Yasin, 2020). Kegiatan ekonomi yang bermacam ragam, dapat mendorong setiap daerah tersebut untuk mengembang potensinya daerahnya (Djadjuli, 2018). Sehingga, pembangunan daerah dapat dilaksanakan secara berkesinambungan dengan tujuan agar pembangunan yang sedang berlangsung di setiap daerah (Jazuli, 2015) dapat dilaksanakan secara prioritas dan potensi daerah tersebut (Muttaqin, 2018). Pembangunan daerah sangat memiliki kaitan dengan pembangunan suatu bangsa (Ahlerup, Baskaran, & Bigsten, 2017) yang mewujudkan keberlangsungan pembangunan suatu negara, keberhasilan pembangunan suatu bangsa tersebut tentunya tidak terlepas dari keberhasilan daerah dalam mengelola sumber daya yang dimiliki secara tepat (Effendya & Harahapb, 2021).

Indonesia merupakan negara berkembang yang terus melaksanakan pembangunan sesuai rencana dan bertahap (Soedarmono, 2010), tanpa mengabaikan usaha pemerataan dan kestabilan. Biasanya setiap daerah diberi kewenangan yang lebih besar untuk mengurus dan mengatur rumah tangganya sendiri. Tujuan kewenangan tersebut adalah untuk lebih mendekatkan pelayanan pemerintah kepada masyarakat, memudahkan masyarakat untuk memantau dan mengontrol penggunaan dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), dan untuk menciptakan persaingan yang sehat antardaerah, serta mendorong timbulnya inovasi (Arina, Koleangan, & Engka, 2021). Menurut (Antari & Sedana, 2018), kinerja keuangan pemerintah dapat diukur berdasarkan seberapa besar kemampuan pemerintah dalam menggali potensi-potensi baik sumber daya alam maupun sumber daya manusia yang dimiliki pada setiap daerah agar dapat memberikan kontribusi terhadap pertumbuhan pendapatan daerahnya setiap tahun.

Salah satu daerah yang merupakan hasil pemekaran adalah Provinsi Kepulauan Riau (Kepri), di mana wilayah ini merupakan daerah otonom yang diharapkan menjadi model berkaitan dalam pengembangan perekonomian dengan adanya 3 kawasan ekonomi khusus (KEK) (Harefa, 2013). Batam merupakan kota yang paling besar di Kepulauan Riau, Indonesia. Kota ini terletak di antara Singapura dan Malaysia. Sehingga dapat dikatakan lokasi Kota Batam ini memberikan dampak pada pertumbuhan ekonomi. Penerapan economic zone di Batam adalah karena adanya keunggulan kompetitif dari segi geografis, yaitu berdekatan dengan Singapura dan Malaysia (Purba & Saputra, 2018). Kota Batam dianggap sangat cepat dalam hal pertumbuhan ekonominya, lebih tinggi dibandingkan dengan perkembangan ekonomi nasional, sehingga kota ini dijadikan andalan bagi pemicu perkembangan ekonomi secara nasional karena letaknya yang strategis. Walaupun begitu, dalam penelitian ini ingin mengetahui pendapatan Kota Batam dalam beberapa periode terakhir, terutama sebelum adanya masa pandemi hingga munculnya masa pandemi. Sektor yang dianggap sebagai acuan dalam penggerak ekonomi, meliputi bidang komunikasi, listrik, air dan gas, perbankan, industri, pelayaran, perdagangan dan jasa, serta komoditi ekspor untuk negara lain. Salah satu daerah yang memiliki perkembangan ekonomi yang sangat tinggi adalah Kota Batam, PAD di Kota Batam tahun 2013-2016 mengalami fluktuasi yang setiap tahunnya jika dilihat dari perhitungan rupiah cenderung mengalami peningkatan. Tentunya melakukan penyediaan infrastruktur dengan pesat perlu diadakan analisis keuangan daerah terhadap pengadaan infrastruktur seperti APBD, PAD, maupun pajak retribusi daerah. Penelitian ini dibuat dengan tujuan sumber dana yang dikelola dapat berjalan secara optimal, efektif dan efisien dalam pembiayaan pembangunannya sesuai dengan anggaran yang telah ditentukan oleh kota tersebut. Adapun rumusan masalah yang ingin ditanggapi dalam penelitian ini adalah mengetahui pertumbuhan ekonomi di Kota Batam dan jumlah pengeluaran, serta pembiayaan daerah di Kota Batam. Tujuan penelitian ini adalah untuk dapat mengidentifikasi dan menganalisis struktur keuangan daerah atau APBD Kota Batam dalam hal data statistik pendapatan, pengeluaran dan pembiayaan daerah. Dikarenakan penurunan pendapatan daerah akibat terdampak Covid-19 mengakibatkan pemerintah harus berupaya meningkatkan kebijakan-kebijakan moneter maupun fiskal agar dapat menstabilkan pendapatan negara (Apriliana, 2020). Solusi yang dapat dilakukan oleh Pemerintah Kota Batam adalah terus berupaya dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi dengan menerapkan beberapa sistem atau kebijakan lainnya, khususnya masa pandemi ini yang dimana dapat membantu Kota Batam tumbuh dan berkembang kembali seperti semula. Dalam sebuah penelitian akan mengharapkan manfaat bagi setiap pembacanya untuk menambah wawasan, pengetahuan maupun pemahaman dimana penelitian ini dapat dijadikan sebagai referensi dalam melakukan penelitian, pemberian solusi maupun masukan terkait APBD Kota Batam.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini digunakan untuk mengukur dan menyelidiki PDRB dan APBD di Kota Batam. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan jenis penelitian kualitatif yang dimana penelitiannya dilaksanakan dengan mengumpulkan data asli yang bersifat deskriptif dimana penelitian ini berkeinginan untuk mendeskripsikan sebuah data yang tersusun secara urut untuk menganalisis suatu data (Darna & Herlina, 2018). Tujuan pada penelitian tersebut untuk menguraikan suatu informasi dengan sedalam-dalamnya dengan pengumpulan data yang dihasilkan mengacu pada pentingnya kedalaman dan detail suatu data penelitian. Selain dari penelitian kualitatif, dalam penelitian ini juga menggunakan penelitian kuantitatif dimana penelitian kuantitatif merupakan cara penemuan

pengetahuan yang menggunakan data berupa angka sebagai alat menganalisis keterangan mengenai apa yang ingin diketahui. Tujuannya ialah untuk melakukan pengujian teori secara spesifik terhadap suatu gejala.

Pada penelitian ini, metode dalam pengumpulan data yang dilakukan, yaitu dengan menganalisis dan menggunakan data sekunder dari 2 tahun terakhir dengan periode tahun 2018-2020 yang bersumber dari situs resmi Badan Pusat Statistik (BPS) Kota Batam yang ditinjau dari batamkota.bps.go.id. Dari situs resmi BPS Kota Batam yang merupakan hasil analisis data-data dari tahun ke tahun, peneliti juga memperoleh informasi-informasi atau fenomena yang terpercaya dimana melibatkan pendapatan pada wilayah Kota Batam yang ditinjau dari berbagai sektor. Penelitian ini bersumber dari data yang telah diperoleh penulis serta variabel yang dimanfaatkan dari penelitian dari setiap data-data yang telah dikumpulkan. Dari data tersebut, penelitian ini tidak hanya dijabarkan secara teoritis namun dijabarkan juga data-data numerik yang mendukung penelitian ini, sehingga pendapatan maupun pertumbuhan perekonomian Kota Batam periode 2018-2020 ini dapat dipaparkan secara jelas.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Untuk mengetahui dan menganalisis pendapatan nasional maupun regional, hal yang diperlukan sebagai pendukung dari penelitian ini yaitu data-data dan informasi akurat. Tahapan-tahapan dalam penganggaran meliputi penyusunan, ratifikasi, pelaksanaan dan pelaporan serta evaluasi. Pada proses penganggaran ini partisipasi dari masyarakat merupakan salah satu prinsip penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang harus dipenuhi yang mana tertuang dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2013. Mengingat tema dari penelitian ini adalah pendapatan nasional atau regional, maka pada penelitian kali ini penulis mengangkat Kota Batam sebagai target dari penelitian ini yang mengutip data maupun informasi dari Badan Pusat Statistik (BPS) Kota Batam. Berikut adalah penjabaran persentase pertumbuhan ekonomi Kota Batam periode 2018-2020 yang dikutip dari BPS Kota Batam.

Tabel 1. Pertumbuhan ekonomi Kota Batam Periode 2018-2020 Sumber: Badan Pusat Statistik Kota Batam

Kategori Lapangan Usaha	Pertumbuhan Ekonomi Kota Batam (Persen)		
	2018	2019	2020
Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	2,72	6,06	-0,47
Pertambangan dan Penggalian	-1,78	1,43	-3,64
Industri Pengolahan	3,50	7,00	3,78
Pengadaan Listrik dan Gas	-1,02	4,23	-2,67
Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	3,14	7,23	-2,83
Konstruksi	8,23	6,92	-6,98
Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	6,92	4,49	-14,73
Transportasi dan Pergudangan	1,43	-17,02	-44,52
Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	10,18	9,62	-45,49
Informasi dan Komunikasi	12,85	11,97	18,09
Jasa Keuangan dan Asuransi	6,09	4,94	-1,18
Real Estate	-5,13	2,10	-16,74

Jasa Perusahaan	7,19	-8,74	-43,33
Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial	8,31	1,08	12,23
Jasa Pendidikan	2,27	0,71	-5,96
Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	3,70	2,10	-2,09
Jasa Lainnya	16,82	1,97	-67,98
PDRB Kota Batam	4,96	5,92	-2,55

Sumber: *Badan Pusat Statistik Kota Batam*

Berdasarkan pencatatan dari BPS Kota Batam pada tabel 1, dapat dilihat bahwa tingkat pertumbuhan ekonomi Kota Batam pada tahun 2019 meningkat secara signifikan dimana kenaikan tersebut mencapai 5,92% dari 4,96% yang merupakan pertumbuhan ekonomi Kota Batam tahun 2018. Pertumbuhan ini diketahui dari pengukuran Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Kota Batam dimana Walikota Batam, Muhammad Rudi mengungkapkan bahwa pencapaian di tahun 2019 ini sebagai bentuk dan bukti nyata bahwa pengembangan maupun pembangunan yang dilakukan oleh pemerintah Kota Batam sudah tepat sasaran. Sektor yang tercatat sebagai pertumbuhan paling signifikan dalam 3 tahun terakhir (2018-2020) adalah sektor informasi dan komunikasi yang mencapai angka 12,85% di tahun 2018, 11,97% di tahun 2019 dan 18,09% di tahun 2020 sehingga menandakan bahwa sektor informasi dan komunikasi ini berkembang baik di Kota Batam. Tidak hanya itu, adapun sektor administrasi pemerintahan, pertahanan, dan jaminan sosial yang memilikipeningkatan baik walaupun di tahun 2019 sempat menurun dan menguat kembali di tahun 2020 dimana tahun 2018 8,31%, tahun 2019 menurun hingga 1,08% dan tahun 2020 meningkat pesat di angka 12,23%. Hal ini juga sebagai bukti nyata bahwa memang pada tahun tersebut pemerintahan Kota Batam terlaksana dengan baik.

Selain peningkatan, ada juga sektor yang mengalami penurunan yang diduga menghambat perekonomian pada Kota Batam adalah sektor jasa lainnya, selain jasa pendidikan, jasa kesehatan dan kegiatan sosial. Sektor ini pada tahun 2017 menduduki posisi sektor dengan pertumbuhan tertinggi yang mencapai 16,82%, tetapi pada tahun 2019 menurun hingga mencapai angka 1,97% dan tahun 2020 menurun drastis hingga menyentuh -67,98% dimana sektor jasa ini mengalami penurunan signifikan pada tahun 2020. Hal tersebut dapat disebabkan oleh wabah covid-19 yang dinyatakan masuk ke Indonesia pada awal tahun 2020 yang mana wabah ini memengaruhi perekonomian seluruh negara, tidak hanya Kota Batam saja. Diungkapkanjuga oleh Walikota Batam, Muhammad Rudi bahwa bahan baku industri banyak yang berasal dari China, banyak karyawan dirumahkan, sektor pariwisata tertekan sehingga membuat pertumbuhan ekonomi melambat. Bukti lainnya yang dapat menyatakan bahwa perekonomian menurun akibat wabah Covid-19 ini adalah hampir sebagian besar sektor juga mengalami penurunan di tahun 2020 yang mana persentasenya berada di posisi minus, sehingga tidak perlu dipungkiri bahwa penurunan tersebut secara langsungberimbas pada PDRB Kota Batam yang juga menurun hingga di angka -2,55%.

Menurut (Asari & Suardana, 2018), sesuai dengan Peraturan Walikota Batam Nomor 25 Tahun 2020 tentang perubahan keempat atas peraturan Walikota Batam Nomor 51 Tahun 2019 tentang penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Batam tahun anggaran 2020, dalam rangka penanganan pandemi Covid-19 dan menghadapi ancaman terhadap perekonomian nasional, maka dalam pelaksanaan APBN tahun 2020, dilakukannya penyesuaian dan penetapan atas alokasi DBH, DAU, DAK, DID. Adapun percepatan dalam penyesuaian APBD tahun 2020, perlindungan terhadap daya beli masyarakat dan perekonomian nasional dengan menyesuaikan target pendapatan daerah dan rasionalisasi belanja daerah yang dituangkan dalam Laporan

Realisasi Anggaran (LRA). Berdasarkan pernyataan tersebut, berikut merupakan perubahan atas penjabaran APBD Kota Batam.

1. Pendapatan			
a. Semula	Rp.	2.958.894.580.542,07	
b. Berkurang	Rp.	<u>620.027.237.649,94</u>	
Jumlah Pendapatan	setelah	Rp.	2.338.867.342.892,13
Perubahan			
2. Belanja			
a. Semula	Rp.	3.013.894.580.542,07	
b. Berkurang	Rp.	<u>639.646.704.911,94</u>	
Jumlah Belanja	setelah	Rp.	2.374.247.875.630,13
Perubahan			
Defisit setelah Perubahan	Rp.	(35.380.532.738,00)	
3. Pembiayaan			
a. Penerimaan			
1) Semula	Rp.	55.000.000.000,00	
2) Berkurang	Rp.	<u>19.619.467.262,00</u>	
Jumlah Penerimaan	setelah	Rp.	35.380.532.738,00
Perubahan			
b. Pengeluaran			
1) Semula	Rp.	0,00	
2) Bertambah	Rp.	<u>0,00</u>	
Jumlah Pengeluaran	setelah	Rp.	0,00
Perubahan			
Jumlah Pembiayaan Netto	Rp.	35.380.532.738,00	
Setelah Perubahan			
Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan	Rp.	0,00	
Anggaran Tahun Berkenaan			
Setelah Perubahan			

Gambar 1. Perubahan penjabaran APBD Kota Batam

Sumber: *Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Batam*

Dari perubahan atas APBD Kota Batam tahun 2020, dapat ditinjau perubahannya pada gambar 1 yang menampilkan 3 kategori, meliputi pendapatan, belanja dan pembiayaan. Pada kategori pendapatan dinyatakan bahwa sebelum perubahan, pendapatan dari APBD Kota Batam sebesar Rp. 2,96 triliun dan setelah perubahan sebesar Rp. 2,34 triliun. Selain itu pada kategori belanja juga dinyatakan bahwa sebelum perubahan sebesar Rp. 3,01 triliun dan setelah perubahan sebesar Rp. 2,37 triliun. Adapun kategori pembiayaan yang terbagi menjadi penerimaan dan pengeluaran, yang mana penerimaan sebesar Rp. 55 miliar sebelum perubahan dan Rp. 35,4 miliar yang merupakan pembiayaan netto setelah perubahan.

Pemerintah Kota Batam pada tahun 2021 diketahui bahwa adanya kesepakatan dari Pemerintah Kota Batam yang telah menetapkan APBD tahun 2021 sebesar Rp. 2,97 triliun, dimana penetapan tersebut telah disepakati. Rincian APBD tahun 2021 sebagai berikut: pendapatan daerah sebesar Rp. 2,86 triliun dengan PAD sebesar Rp. 1,43 triliun dan pendapatan transfer sebesar Rp. 1,31 triliun. Sedangkan, untuk belanja daerah diketahui sebesar Rp. 2,96 triliun, yang terdiri atas belanja tidak terduga sebesar Rp. 87 miliar. Sisa lebih dari perhitungan anggaran daerah tahun sebelumnya sebesar Rp. 107,7 miliar. Penyusunan dan penjabaran anggaran tersebut juga terdapat penyesuaian nama program kegiatan yang akan dilaksanakan pada tahun 2021 untuk

pencapaian Visi dan Misi Kota Batam Tahun 2016–2021. Tidak hanya itu, Walikota Batam Muhammad Rudi menyampaikan jika Kebijakan Umum APBD Kota Batam tahun 2021 juga memuat kondisi ekonomi makro daerah, asumsi penyusunan APBD, Kebijakan Pendapatan Daerah, Kebijakan Belanja Daerah dan Kebijakan Pembiayaan Daerah. Agenda Anggaran Kota Batam tahun 2021 ini disusun saat perekonomian Kota Batam sedang melambat akibat pandemi Covid-19 dimana Pemerintah Kota Batam optimis jika Kota Batam mampu tumbuh dan berkembang kembali seperti semula.

KESIMPULAN

Perkembangan ekonomi sebagai perubahan keadaan perekonomian suatu negara secara berkelanjutan, melalui kenaikan kapasitas produksi negara tersebut dalam bentuk kenaikan pendapatan nasional. Faktor utama yang mempengaruhi pertumbuhan tersebut, yaitu jumlah pengeluaran daerah seperti pembangunan infrastruktur daerah. Kegiatan ekonomi yang bermacam-macam mendorong setiap daerah untuk terus mengembangkan potensi ekonominya agar pembangunan daerah dilaksanakan secara terpadu dan serasi dengan tujuan agar pembangunan yang berlangsung di setiap daerah dapat dilaksanakan secara prioritas dan potensi daerah tersebut. Dapat dilihat bahwa tingkat pertumbuhan ekonomi Kota Batam pada tahun 2019 meningkat secara signifikan dimana kenaikan tersebut mencapai 5,92% dari 4,96% yang merupakan pertumbuhan ekonomi Kota Batam tahun 2018. Pencapaian di tahun 2019 ini dianggap sebagai bentuk dan bukti nyata bahwa pengembangan maupun pembangunan yang dilakukan oleh pemerintah Kota Batam sudah tepat sasaran. Sektor yang tercatat sebagai pertumbuhan paling signifikan dalam 3 tahun terakhir (2018-2020) adalah sektor informasi dan komunikasi yang mencapai angka 12,85% di tahun 2018, 11,97% di tahun 2019 dan 18,09% di tahun 2020 sehinggamenandakan bahwa sektor informasi dan komunikasi ini berkembang baik di Kota Batam. Tidak hanya itu, adapun sektor administrasi pemerintahan, pertahanan dan jaminan sosial yang memiliki peningkatan baik walaupun di tahun 2019 sempat menurun dan menguat kembali di tahun 2020 dimana tahun 2018 8,31%, tahun 2019 menurun hingga 1,08% dan tahun 2020 meningkat pesat di angka 12,23%. Hal ini juga sebagai bukti nyata bahwa memang pada tahun tersebut pemerintahan Kota Batam terlaksana dengan baik. Selain peningkatan, ada juga sektor yang mengalami penurunan yang diduga menghambat perekonomian pada Kota Batam adalah sektor jasa lainnya, selain jasa pendidikan, jasa kesehatan dan kegiatan sosial. Sektor ini pada tahun tahun 2017 menduduki posisi sektor dengan pertumbuhan tertinggi yang mencapai 16,82%, tetapi pada tahun 2019 menurun hingga mencapai angka 1,97% dan tahun 2020 menurun drastishingga menyentuh -67,98% dimana sektor jasa ini mengalami penurunan signifikan pada tahun 2020. Perubahan APBD Kota Batam tahun 2020 meliputi 3 kategori, dimana pada kategori pendapatan dinyatakan bahwa sebelum perubahan, pendapatan dari APBD Kota Batam sebesar Rp. 2,96 triliun dan setelah perubahan sebesar Rp 2,34 triliun. Pada kategori belanja juga dinyatakan bahwa sebelum perubahan sebesar Rp 3,01 triliun dan setelah perubahan sebesar Rp. 2,37 triliun. Adapun kategori pembiayaan yang terbagi menjadi penerimaan dan pengeluaran, yang mana penerimaan sebesar Rp 55 miliar sebelum perubahan dan Rp. 35,4 miliar yang merupakan pembiayaan netto setelah perubahan. Pada tahun 2021 diketahui bahwa adanya kesepakatan dari Pemerintah Kota Batam yang telah menetapkan APBD tahun 2021 sebesar Rp. 2,97 triliun, dimana penyusunan dan penjabaran anggaran tersebut juga terdapat penyesuaian nama program kegiatan yang akan dilaksanakan pada tahun 2021 untuk pencapaian Visi dan Misi Kota Batam Tahun 2016–2021. Walikota Batam Muhammad Rudi menyampaikan jika Kebijakan Umum APBD Kota Batam tahun 2021 juga memuat kondisi ekonomi makro

daerah, asumsi penyusunan APBD, Kebijakan Pendapatan Daerah, Kebijakan Belanja Daerah dan Kebijakan Pembiayaan Daerah yang disusun saat perekonomian Kota Batam sedang melambat akibat pandemi Covid-19 dimana Pemerintah Kota Batam optimis jika Kota Batam mampu tumbuh dan berkembang kembali seperti semula. Kota Batam memberikan dampak pada pertumbuhan ekonomi. Kota Batam dianggap sangat cepat dalam hal pertumbuhan ekonominya, lebih tinggi dibandingkan dengan pertumbuhan ekonomi nasional, sehingga kota ini dijadikan penunjang bagi pemicu perkembangan ekonomi nasional karena letaknya yang strategis. Meskipun Kota Batam mempunyai pertumbuhan ekonomi yang sangat signifikan, namun bukan berarti Kota Batam ini bebas dari resiko yang ada, salah satunya mengalami penurunan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Kota Batam sebesar -2,55% yang disebabkan oleh wabah Covid-19 yang dinyatakan masuk ke Indonesia pada awal tahun 2020 dimana wabah ini mempengaruhi perekonomian seluruh negara. Maka disarankan agar pemerintah Kota Batam terus berupaya dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi dengan menerapkan beberapa sistem atau kebijakan lainnya untuk menghadapi wabah Covid-19, sehingga Kota Batam mampu tumbuh dan berkembang kembali seperti semula.

BIBLIOGRAPHY

- Ahlerup, Pelle, Baskaran, Thushyanthan, & Bigsten, Arne. (2017). Regional development and national identity in sub-Saharan Africa. *Journal of Comparative Economics*, 45(3), 622–643. <https://doi.org/https://doi.org/10.1016/j.jce.2016.02.001>
- Alghofari, Farid, & Pujiyono, Arif. (2011). *Analisis tingkat pengangguran di Indonesia tahun 1980-2007*. Semarang: Undip.
- Antari, Ni Putu Gina Sukma, & Sedana, Ida Bagus Panji. (2018). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah dan Belanja Modal Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah. *E-Jurnal Manajemen*, 7(2), 1080–1110.
- Apriliana, Eka Sri. (2020). Upaya Peningkatan Pendapatan Nasional di Tengah Wabah Virus Corona Perspektif Ekonomi Islam. *Al Iqtishadiyah Jurnal Ekonomi Syariah Dan Hukum Ekonomi Syariah*, 6(1), 19–28.
- Arina, Meylani M., Koleangan, Rosalina A. M., & Engka, Daisy S. M. (2021). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Bagi Hasil, Dana Alokasi Umum, Dan Dana Alokasi Khusus Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Kota Manado. *Jurnal Pembangunan Ekonomi Dan Keuangan Daerah*, 20(3), 26–35.
- Asari, Ni Made Arni, & Suardana, Ketut Alit. (2018). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan, dan Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah pada Belanja Daerah. *E-Jurnal Akuntansi*, 25(2), 877–904.
- Darna, Nana, & Herlina, Elin. (2018). Memilih Metode Penelitian Yang Tepat: Bagi Penelitian Bidang Ilmu Manajemen. *Jurnal Ekologi Ilmu Manajemen*, 5(1), 287–292.
- Djadjuli, Didi. (2018). Peran Pemerintah Dalam Pembangunan Ekonomi Daerah. *Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi Negara*, 5(2), 8–21.
- Effendya, Syahril, & Harahapb, Baru. (2021). Analisis Faktor-Faktor Yang Memengaruhi Pendapatan Asli Daerah Kota Batam. *SNISTEK*, 138–143. Batam.
- Harefa, Mandala. (2013). Struktur Pertumbuhan Ekonomi dan Sektor Potensial Kota Batam dan Kabupaten Karimun Provinsi Kepulauan Riau. *Jurnal Ekonomi & Kebijakan Publik*, 4(2), 175–193.
- Hukom, Alexandra. (2014). Hubungan ketenagakerjaan dan perubahan struktur ekonomi terhadap kesejahteraan masyarakat. *Jurnal Ekonomi Kuantitatif Terapan*, 7(2), 120–129.

- Jazuli, Ahmad. (2015). Dinamika Hukum Lingkungan Hidup dan Sumber Daya Alam dalam Rangka Pembangunan Berkelanjutan. *Jurnal Rechts Vinding: Media Pembinaan Hukum Nasional*, 4(2), 181–197.
- Muttaqin, Rizal. (2018). Pertumbuhan Ekonomi dalam Perspektif Islam. *Maro: Jurnal Ekonomi Syariah Dan Bisnis*, 1(2), 117–122.
- Purba, Daris, & Saputra, Asron. (2018). Faktor Dominan Penurunan Pertumbuhan Ekonomi Batam. *Prosiding Seminar Nasional Ilmu Sosial Dan Teknologi (SNISTEK)*, (1), 37–42.
- Soedarmono, Yuyun S. M. (2010). Donor issues in Indonesia: A developing country in South East Asia. *Biologicals*, 38(1), 43–46.
<https://doi.org/https://doi.org/10.1016/j.biologicals.2010.02.001>
- Yasin, Muhammad. (2020). Analisis Pendapatan Asli Daerah dan Belanja Pembangunan terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Kabupaten/Kota Jawa Timur. *COSTING: Journal of Economic, Business and Accounting*, 3(2), 465–472.



This work is licensed under a [Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/)